



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PUNJUL SAEPUL HAYAT
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 156274

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.008.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 198 m2/150 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 290 m2/209 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 628.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/180 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 147 m2/142 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 717.500.000
5. Tanah Seluas 325 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 162.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **306.000.000**

1. MOTOR, HONDA TIGER GL 200/SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO BRIO DD1 1,2 EAT/MINIBUS ` Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. MOBIL, HONDA HR-V HONDA HR-V RU1 1.5 E CTV/MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **8.700.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **580.493.176**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp.

Rp.

3.903.693.176

III. HUTANG

Rp.

100.098.029

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

3.803.595.147

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.